

PENGGUNAAN *PORTAL WEB* OLEH KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Wahyudiyono

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Surabaya

Jl. Raya Ketajen No. 36, Gedangan, Sidoarjo

Email : wahyudiku@yahoo.co.id

Naskah Diterima : 14 Juni 2016 | Direvisi : 11 Juli 2016 | Disetujui : 24 Juli 2016

Abstrak

Jurnalisme warga mulai menjadi tren baru tentang bagaimana pembaca atau pemirsa membentuk informasi dan berita. Jurnalisme warga (*citizen journalism*) adalah aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa (bukan wartawan). Konsep jurnalisme warga didasarkan warga masyarakat yang berperan aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis, dan menyebarkan berita dan informasi. Jurnalisme warga banyak dilakukan kelompok informasi masyarakat (KIM). KIM tersebut menulis beritanya dalam *portal web* sendiri atau *portal web* milik pemerintah. Masalah dalam penelitian adalah bagaimana penggunaan *portal web* oleh anggota KIM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Narasumber adalah pejabat pembina KIM, pengurus pada tiga KIM dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan anggota KIM banyak membuat berita melalui *portal web*. Mereka senang menulis dalam *portal web* sebab sering dibaca oleh pejabat pemerintah. Berita tentang keluhan warga, dengan cepat mendapat respon dari pemerintah. Penulisan berita melalui *portal web* dinilai efektif untuk menyampaikan permasalahan warga pada pejabat pemerintah tetapi kurang efektif untuk menyampaikan informasi pada masyarakat karena belum banyak masyarakat yang menggunakan internet.

Kata kunci : penggunaan, *portal web*, kelompok informasi masyarakat

PORTAL WEB USE BY COMMUNITY INFORMATION GROUP AT THE WEST LOMBOK REGENCY

Abstract

Citizen journalism starts to become a new trend about how readers and viewers form information and news. Citizen journalism is journalism activity done by common people (not professional journalists). The concept of citizen journalism is based on community member activity taking role in the collecting, reporting, analyzing as well as spreading news and information. Citizen journalism is greatly done by Community Information Group (CIG). The CIG writes news in the private portal web or portal web owned by the government. The problem in this research is "how the members of the CIG uses the portal web". This research uses the qualitative approach. The key source of this research are : the officials in charge of guiding the CIG, the officers at three CIGs and community leaders. Research result shows many CIG members write news through portal web. They like writing in the portal web because government officials often read it. News about citizens' complain is quickly responded by the government. News writing through portal web is considered effective to convey citizen problems to government officials but it is less effective to convey information to the community because there are not many community members using the internet.

Keywords: *use, portal web, community information group (CIG)*

PENDAHULUAN

Era keterbukaan informasi yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi, menjadikan dunia seakan tanpa mengenal batas wilayah. Manusia dengan mudah dan cepat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Kondisi ini sesuai konsep pemikiran "desa global" oleh Marshall

McLuhan. Pemikiran McLuhan itu dituangkan dalam bukunya yang berjudul "Understanding Media: Extension of A Man" pada awal tahun 1960-an. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi, dunia dianalogikan sebagai "desa global" atau "kampung global". McLuhan mengemukakan, suatu saat informasi akan sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua

orang. Pemikiran McLuhan itu pada awalnya dianggap aneh karena pada masa tersebut internet belum ada. Televisi dan radiopun masih terbatas jumlah dan jangkauannya.

Peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam hal ini internet pada pertumbuhan ekonomi, sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya pada peningkatan nilai tambah jasa atau produk yang dihasilkan dengan pemanfaatan internet. Dalam studi yang dilakukan World Bank terhadap 120 negara pada tahun 1980 – 2006, menyimpulkan, bahwa kenaikan 10% penetrasi broadband dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita di negara berkembang sebesar 1,38%. Sedang Mc.Kinsey Global Institute menyatakan bahwa sumbangan internet untuk PDB tingkat dunia memberikan kontribusi 2,9 persen (Kemenkominfo, 2012). Sektor TIK yang sehat memiliki efek penyebaran yang kuat. Setiap pekerjaan TIK menciptakan sekitar tiga lapangan pekerjaan di sektor lain. Selain itu, sektor TIK yang aktif juga dapat mendorong pembangunan sosial yang lebih merata dan sektor publik yang lebih transparan serta efisien (Michael Gryseels, 2015).

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi satu kebutuhan masyarakat. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas adalah informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan untuk pengambilan keputusan. Meskipun teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi kebutuhan, masih terdapat kesenjangan informasi di masyarakat.

Kesenjangan informasi menunjukkan ketidakmampuan mengakses dan menggunakan informasi yang bisa berdampak pada kesejahteraan seseorang. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani konvensi internasional mengenai masyarakat informasi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, TIK di Indonesia berkembang dan menjadi perhatian utama pembangunan. Indonesia perlu mengembangkan TIK untuk menunjang pemberdayaan masyarakat karena TIK terbukti berhasil membantu secara efektif upaya

mengurangi kemiskinan. Teknologi informasi dan komunikasi juga harus mampu menjamah masyarakat di tingkat pedesaan.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang informasi dan komunikasi merupakan hal yang penting, karena teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu aspek yang dapat mendukung tercapainya kesejahteraan bangsa. Dalam menunjang pemberdayaan masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi Dan Informatika mendorong penggunaan TIK sehingga dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi dapat memanfaatkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), karena KIM sebagai komunitas masyarakat informasi yang tumbuh dan berkembang di tengah – tengah kehidupan masyarakat merupakan masyarakat yang sadar informasi. KIM diharapkan dapat berperan menjadi fasilitator untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat (top down) atau sebaliknya antara masyarakat dan pemerintah (bottom up). Cara menjembatani informasi yang dilakukan KIM saat ini banyak dilakukan melalui media internet. Anggota KIM sebagai agen informasi, berperan aktif mendistribusikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat atau pemerintah dengan menuliskan laporan kondisi yang ada di masyarakat, atau apa yang diharapkan pemerintah melalui portal internet. Laporan yang ditulis anggota masyarakat ini merupakan bentuk jurnalisme warga.

Jurnalisme warga (citizen journalism) adalah aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa (bukan wartawan). Konsep jurnalisme warga didasarkan warga masyarakat (public citizens) yang berperan aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis, dan menyebarkan berita dan informasi. Berita atau informasi yang diproduksi jurnalis warga disebarluaskan melalui berbagai media, baik media mainstream yang menyediakan ruang jurnalisme warga maupun media milik warga sendiri blog, majalah, buletin, radio komunitas, dan sebagainya. Jurnalisme warga didasari oleh gagasan bahwa masyarakat yang tidak mengalami pelatihan maupun pendidikan

jurnalisme profesional dapat memanfaatkan peralatan teknologi modern dan internet global untuk berkreasi, melengkapi maupun memeriksa fakta-fakta yang diberitakan dalam media. Hal itu bisa dilakukan sendiri maupun berkolaborasi dengan yang lain.

Dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, semua orang juga bisa memiliki media sendiri secara online seperti Blog, Facebook, Twitter, Youtube dll. Kemudahan menulis berita dan menyebarkannya via internet, membuat jurnalisme warga memiliki masa depan yang cerah. Dengan "sedikit" ketrampilan menulis berita, edit foto dan video, semua orang bisa menjadi reporter, melaporkan setiap peristiwa yang mereka lihat dan dengar sebagaimana layaknya wartawan profesional.

Setiap komunitas, perkumpulan, forum, juga bisa membuat media sendiri. Komunitas yang sering melakukan jurnalisme warga adalah Kelompok Informasi Masyarakat. Di Kabupaten Lombok Barat, kelompok informasi masyarakat dibina oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Anggota KIM membuat berita tentang kondisi yang terjadi di masyarakat dan program-program yang sedang dilakukan pemerintah. Dishubkominfo memfasilitasi website-nya untuk memuat berita yang dibuat anggota KIM.

Berdasar latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana penggunaan *portal web* oleh Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat?

Tinjauan Pustaka

1. Diseminasi Informasi

Dalam PerMen Kominfo No.17/PER/M.Kominfo/03/2009, pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Diseminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat. Melalui Diseminasi Informasi Nasional bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkokoh

integritas nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung tercapainya tujuan diseminasi informasi maka Menkominfo juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo No.7/PER/M.Kominfo/06/2010, tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media. Melalui Peraturan Menteri tersebut akan terjalin kemitraan antara pemerintah dan media, sehingga akan saling memperkuat dan terbangun keterbukaan serta kepercayaan antara pemerintah dan media, baik media cetak, elektronik serta media komunitas di bidang diseminasi informasi. Pengembangan kemitraan media diarahkan untuk meningkatkan peran, profesionalisme, dan kesamaan persepsi dalam meningkatkan pemerataan informasi, mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Agen perubahan

Seorang agen perubahan adalah seorang individu yang memengaruhi klien dalam mengambil keputusan inovasi agar sesuai dengan yang diharapkan oleh agen perubahan itu sendiri. Seorang agen perubahan biasanya mengadopsi sebuah ide baru, tetapi dia juga dapat memperlambat proses difusi dan mencegah suatu adopsi dari inovasi dengan efek yang tidak diharapkan. Terdapat perbedaan untuk menentukan siapa saja agen perubahan. Guru-guru, para konsultan, dokter umum, agen perluasan agrikultural, pekerja pengembangan, sales, anggota LSM, anggota lembaga komunikasi seperti kelompok informasi masyarakat, bisa dianggap sebagai agen perubahan. Salah satu peran utama dari agen perubahan adalah memfasilitasi aliran/arus inovasi dari agen perubahan sampai kepada pembaca/pendengar/audiens dari klien atau orang sebagai sasaran perubahan.

Agar tipe komunikasi ini dapat efektif, inovasi harus diseleksi/dipilih agar cocok/sesuai dengan kebutuhan klien. Agar pertalian/hubungan dapat berjalan efektif, feedback/umpan balik dari sistem klien harus mengalir/mengarah sampai agen perubahan kepada perwakilan perubahan dengan begitu dapat diatur program yang cocok dengan kebutuhan klien.

Agen perubahan mungkin saja tidak dibutuhkan dalam difusi inovasi jika didalamnya tidak terdapat kemasyarakatan dan perbedaan

teknis antara agen perubahan (change agency) dan sistem klien. Sistem agen (agency) perubahan biasanya terdiri/tersusun dari individu-individu yang memiliki derajat/tingkat yang tinggi dalam menghargai suatu difusi yang sedang didifusikan; agen perubahan secara personal mungkin dapat berupa Ph.D dalam bidang agrikultur, science, atau bidang-bidang teknik lainnya.

Pemimpin mereka (agen perubahan) mengetahui bahwa sulit bagi mereka untuk mengkomunikasikan secara langsung suatu inovasi dengan klien. Mereka berbeda (heterophily) dalam sub-kebudayaan bahasa, status sosio-ekonomi, kepercayaan dan nilai-nilai. Jurang pemisah heterophily ini dari kedua sisi antara agen perubahan membuat peran konflik dan masalah yang pasti dalam komunikasi. Sebagai jembatan/penengah dua sistem berbeda, agen perubahan adalah sebuah figur/bentuk yang marginal/terpinggirkan dalam masing-masing dari dua dunia.

Menurut Rogers dan Shoemaker (1971), agen perubahan adalah petugas profesional yang mempengaruhi putusan inovasi para anggota masyarakat menurut arah yang diinginkan oleh lembaga perubahan. Jadi semua orang yang bekerja untuk memelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan sosial adalah termasuk agen-agen perubahan. Agen-agen perubahan berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antara dua (atau lebih) sistem sosial. Yaitu menghubungkan antara suatu sistem sosial yang memelopori perubahan dengan sistem sosial masyarakat yang dibinanya dalam usaha perubahan tersebut.

Kompetensi komunikasi seorang agen perubahan di bidang apa pun, amat ditentukan oleh faktor kredibilitas seorang agen perubahan di mata khalayak. Untuk dapat diterima sebagai seorang komunikator yang dipercaya, pertamanya seorang agen perubahan harus sudah memenuhi sejumlah prasyarat tertentu yang pada pokoknya kelak menentukan berhasil tidaknya ia dalam melaksanakan tugas-tugas perubahan itu sendiri. Yang dimaksud dengan kompetensi komunikasi di sini, adalah sejumlah kemampuan dasar dalam berkomunikasi yang harus dimiliki oleh seorang agen perubahan agar kegiatannya nanti di tengah-tengah masyarakat dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Di antara kemampuan-kemampuan berkomunikasi yang dipersyaratkan bagi seorang agen perubahan

adalah, dapat menjangkau khalayak yang hendak disuluhnya, menguasai bahasa yang dimengerti oleh khalayak yang akan disuluh dan berpenampilan yang dapat diterima oleh khalayak.

3. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Dibubarkannya Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wachid di era reformasi, menyebabkan terjadinya kekosongan lembaga penyalur informasi dan aspirasi masyarakat dalam bidang informasi dan komunikasi di daerah. Untuk mengisi kekosongan tersebut maka dalam upaya menyalurkan aspirasi masyarakat pemerintah merasa perlu mengembangkan lagi wadah pemberdayaan masyarakat. Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010, tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Dalam PerMen tersebut, pada beberapa pasal menjelaskan tentang keberadaan kelompok informasi masyarakat (KIM), yaitu :

- a) Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Pedesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.
- b) Lembaga Komunikasi Pedesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya disingkat KIM, yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Dikeluarkannya PerMen tersebut dilakukan karena melihat kondisi masyarakat yang belum mempunyai kemampuan cukup untuk menelaah berbagai informasi yang disebabkan karena kondisi sosial, ekonomis, dan kultural yang beragam. Selain itu keterbatasan akses serta kemampuan masyarakat untuk dapat memanfaatkan informasi belum memadai. Hal itu semakin diperkuat dengan kondisi wilayah geografis Indonesia yang menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi di beberapa wilayah, seperti daerah terpencil, daerah perbatasan, ataupun wilayah tertinggal lainnya.

4. Teori Penggunaan dan Pemenuhan Kebutuhan (Uses and Gratification Theory)

Salah satu tradisi riset media yang hingga kini cukup populer di kalangan peneliti yaitu penelitian tentang penggunaan media, yang mengacu pada teori penggunaan dan gratifikasi atau *uses-and-gratifications* (baca: U & G). Berbeda dengan teori efek media lainnya yang menitikberatkan pada “apa yang dilakukan media terhadap khalayak” dan menganggap pengguna media bersifat homogen, *uses-and-gratifications* lebih memberikan perhatian pada “apa yang dilakukan khalayak terhadap media” sebagai bentuk perilaku individu sebagai khalayak aktif.

Uses-and-gratifications awalnya dikembangkan oleh Katz dan Gurevic dari “*Mass Media Uses and Gratification Model*” yang dipublikasikannya untuk kali pertama pada 1974. Teori ini muncul pada saat teknologi televisi berkembang sekitar tahun 1960-an. Teoritis media tertarik dengan pilihan yang dibuat oleh khalayak dalam mengonsumsi pesan media. Asumsi teori ini yaitu, khalayak aktif dalam memenuhi kebutuhannya dan dorongannya. Teori ini termasuk ke dalam tradisi sosio-psikologis yang memahami komunikasi sebagai pengaruh antarpribadi.

Asumsi dasar pendekatan teori ini adalah bahwa pengguna media bersifat aktif. Mereka menggunakan media karena memiliki tujuan tertentu. Karena memiliki sumber-sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya, mereka berinisiatif mengaitkan kebutuhan dan pilihan media. Konsumsi media dapat memenuhi berbagai kebutuhan meskipun isi media tidak dapat digunakan untuk memprediksi pola gratifikasi secara tepat. Keaktifan khalayak ditandai dengan pilihan-pilihan yang dibuat khalayak yang dilatarbelakangi oleh alasan-alasan yang berbeda. Alasan-alasan yang dimaksud misalnya alasan untuk keluar dari masalah atau aktivitas rutin (escape), mencari informasi (information seeking), mencari hiburan (entertainment), membangun hubungan sosial (social relationship), dan membangun identitas pribadi (personal identity).

Asumsi dasar dari teori *uses and gratifications*, yaitu :

- a. Khalayak dianggap aktif; artinya khalayak sebagai bagian penting dari penggunaan media massa diasumsikan mempunyai tujuan.
- b. Dalam proses komunikasi massa, inisiatif untuk mengaitkan pemuasan kebutuhan

dengan pemilihan media terletak pada khalayak.

- c. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media lebih luas. Bagaimana kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung kepada perilaku khalayak yang bersangkutan.
- d. Tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak Artinya, orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu.
- e. Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak (Elvinaro dan Lukiati, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian adalah penggunaan *portal web* oleh kelompok informasi masyarakat Kabupaten Lombok Barat yaitu kegiatan-kegiatan penggunaan *portal web*, hasil dari kegiatan penggunaan *portal web* dan respon atas hasil dari kegiatan penggunaan *portal web*. Obyek penelitian adalah tiga kelompok informasi masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Barat yaitu KIM Mekarsari, KIM Albajuri dan KIM Lembar bersaing. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Wawancara dilakukan secara tatapmuka dengan narasumber dan menggunakan telephon. Sedangkan data sekunder dengan teknik dokumentasi dan studi pustaka meliputi peraturan undang-undangan, dan dokumen hasil penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Informan penelitian ini yaitu Drs. Rasidi, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dishubkominfo Lombok Barat selaku Pembina KIM dan masing-masing tiga orang narasumber dari Kelompok Informasi Masyarakat yaitu ketua KIM, tokoh masyarakat, dan kepala desa di wilayah operasi kelompok informasi masyarakat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Triangulasi*, yaitu proses *chek* dan *recek*

antara satu sumber data dengan sumberdata lainnya.

PEMBAHASAN

Sejarah KIM di Lombok Barat

Awal berdirinya KIM di Lombok Barat dimulai dari dibentuknya Jaringan Komunikasi Lombok Barat atau biasa di singkat Jaring Kobar, yang berada di bawah binaan Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik Dishubkominfo. Jaring Kobar oleh Dishubkominfo Kabupaten Lombok Barat difasilitasi *portal web* untuk memuat berita yang dibuat anggota Jaring Kobar. Pada saat terjadi pemilihan bupati kepala daerah Lombok Barat tahun 2004, salah satu Jaring Kobar memberitakan dugaan pemakaian ijazah palsu oleh salah satu calon wakil bupati. Dalam pemilihan yang berlangsung saat itu, pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diberitakan oleh Jaring Kobar menggunakan ijazah palsu, memenangkan pemilihan. Setelah Bupati terpilih dilantik, Jaring Kobar dilepaskan dari pembinaan Bidang Informasi Komunikasi Publik Dishubkominfo. Penghentian pembinaan dan fasilitas oleh Dishubkominfo membuat Jaring Kobar mati dengan sendirinya.

Setelah masa kepemimpinan Bupati tersebut selesai tahun 2009, pembinaan terhadap jaringan komunikasi mulai dilakukan kembali. Saat itu Dishubkominfo Propinsi Nusa Tenggara Barat telah membina jaringan komunikasi yang dinamakan Kampung Media. Kampung Media adalah program penyebarluasan informasi berbasis komunitas dan seluruh kegiatannya menggunakan sebuah *portal web*. Portal yang dikelola Kampung Media sudah berjalan sangat baik, terbukti dari penghargaan yang diperolehnya sebagai Nine Top Inovasi Daerah dalam bidang pelayanan publik dari pemerintah pusat. Pada 5 Desember 2011 lalu, Kampung Media juga berhasil meraih penghargaan USO Award atau Universal Service Obligation Award, sebuah penghargaan bidang pelayanan umum sebagai media dengan ide kreatif terbaik dalam upaya penyebarluasan informasi di NTB. Selain itu, AIPD (The Australia Partnership for Decentralisation) menilai Kampung Media sebagai The Best Practise pengembangan konten media yang bisa disebar ke daerah lain.

Anggota dan pengurus Kampung Media yang tinggal di Lombok Barat inilah yang

menjadi penggerak dibentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Lombok Barat, yang pembentukannya diinisiasi oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dishubkominfo Kabupaten Lombok Barat. Pada 10 kecamatan yang ada di Lombok barat dibentuk satu KIM. Dalam perkembangannya saat ini ada kecamatan yang KIMnya lebih dari satu sehingga saat ini terdapat 12 KIM.

Kegiatan yang dilakukan oleh KIM Lombok Barat, mirip yang dilakukan oleh Kampung Media yaitu penyebarluasan informasi berbasis komunitas dan seluruh kegiatannya menggunakan sebuah portal informasi, berita dan jurnalisme. Penyebaran informasi dituangkan dalam sebuah media online yang berasal dari jurnalisme warga, yang menampung konten yang diunggah oleh anggota KIM. Anggota KIM diberi kebebasan untuk mengemukakan, mengekspresikan, serta menyampaikan berbagai gagasan, pendapat, ulasan, ataupun tanggapan, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan hukum.

Struktur organisasi KIM yang ada di Lombok barat yang dibina Dishubkominfo, bentuknya hampir sama yaitu ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Anggota KIM yang termuat dalam *portal web* Dishubkominfo umumnya sekitar 12 orang. Umumnya mereka tersebar dari berbagai desa di satu kecamatan. Setiap desa diwakili paling tidak satu anggota. Struktur organisasi KIM tersebut dibuat sederhana karena kegiatan yang paling banyak adalah menyerap aspirasi warga, menulis laporan dan mengirim laporan tersebut pada admin *portal web* Dishubkominfo. Tulisan tersebut juga termuat dalam *portal web* yang tidak berbayar. Meskipun ada bendahara, tetapi fungsi bendahara tidak memerankan fungsinya karena sedikitnya dana yang dioperasikan. Dana KIM hanya berasal dari sumbangan Dishubkminfo untuk setiap tulisan yang dimuat di *portal web* Dishubkominfo sebesar Rp 75.000,-. Honor penulisan diberikan pada KIM, paling banyak 5 tulisan selama sebulan. Honor penulisan hanya dibayarkan bulan Januari sampai dengan bulan Oktober.

Kegiatan Penggunaan *Portal web*

Penggunaan internet di masyarakat Lombok Barat umumnya sudah cukup banyak

mengingat Pulau Lombok banyak memiliki obyek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara diantaranya Pantai Senggigi, Gili Trawangan, Pantai Kuta Lombok dll. Pulau Lombok juga sangat dekat dengan Pulau Bali. Banyaknya kunjungan wisman di daerah tersebut juga didukung oleh jaringan TIK yang memadai terutama di wilayah wisata.

Sebagian besar anggota KIM telah memiliki perangkat komunikasi yang terhubung internet. Penggunaan perangkat TIK pada anggota KIM umumnya lebih tinggi atau banyak dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya karena mereka umumnya berpendidikan lebih tinggi dan memiliki ketertarikan yang tinggi untuk berbagi informasi dengan masyarakat. Perangkat TIK yang paling banyak digunakan oleh anggota KIM adalah Handphone android. Hanya beberapa anggota KIM yang tidak memiliki handphone android. Mereka umumnya berada di pedesaan yang sinyal telekomunikasi lemah bahkan tidak terjangkau yaitu di sekitar ujung barat Kecamatan Sekotong dan ujung timur Kecamatan Narmada.

Apabila anggota KIM menemukan bahan atau informasi yang ingin ditampilkan dalam *portal web*, mereka menuliskan laporan dengan perangkat laptop atau komputer yang dimilikinya. Anggota KIM yang menemukan atau memiliki bahan untuk menulis berita tetapi tidak memiliki laptop atau komputer, penulisan laporan dilakukan oleh anggota yang memiliki laptop atau komputer. Anggota yang tidak memiliki komputer tersebut menyampaikan detail informasi pada ketua KIM atau anggota KIM lainnya yang memiliki laptop atau komputer. Biasanya setelah teman yang memiliki laptop atau komputer membuat laporan, hasil tulisan tersebut diperiksa oleh anggota yang melaporkan informasi untuk ditulis. Anggota KIM yang memiliki laptop atau komputer jumlah masih sedikit sehingga penulisan naskah berita banyak dilakukan oleh anggota KIM yang memiliki laptop atau komputer.

Setelah bahan untuk pemberitaan telah selesai dibuat, laporan untuk pemberitaan tersebut kemudian diserahkan pada Ketua KIM. Penyerahan bahan tulisan tersebut bisa diserahkan secara langsung melalui flasdisk karena tempat tinggal mereka umumnya dekat dan sering bertemu, atau mereka mengirimkan

berita yang ditulis melalui email pada ketua KIM-nya. Ketua KIM kemudian memeriksa naskah yang dibuat anggotanya. Apabila perlu perbaikan maka Ketua KIM memperbaiki atau mengedit naskah berita tersebut. Apabila ada informasi yang kurang, Ketua KIM bisa meminta keterangan tambahan pada penulis naskah maupun narasumber. Ketua KIM bisa mengedit tulisan tersebut baik dalam tata bahasanya maupun esensi pemberitaannya.

Setelah bahan tulisan telah diperiksa dan diedit oleh Ketua KIM, bahan tulisan tersebut dikirim kepada Ketua KIM Mekarsari Pak Abdul Satar yang menjadi admin *portal web* Dishubkominfo. Dia menjadi satu-satunya Ketua KIM yang bisa meng *upload* berita dalam *portal web* Dishubkominfo dan KIM. Pengiriman naskah berita pada Ketua KIM Mekarsari dilakukan dengan menggunakan email. Oleh Ketua KIM Mekarsari, bahan tulisan tersebut diedit lagi. Edit yang dilakukan umumnya tentang gaya bahasanya sehingga memenuhi syarat jurnalisme. Apabila telah memenuhi syarat, tulisan tersebut diunggah di *portal web* Dishubkominfo.

***Portal web* Dishubkominfo dan *Portal web* KIM**

Hasil atas proses penulisan berita atas informasi yang ada di masyarakat melalui media internet pada KIM di Lombok Barat adalah ditampilkannya laporan atau informasi dari anggota KIM di *portal web* Dishubkominfo dengan alamat <http://dishubkominfo.lombokbaratkab.go.id/>.

Berita tersebut juga termuat dalam *portal web* KIM tak yang tak berbayar di alamat <https://kimlombokbaratkab.wordpress.com/>.

Dalam tampilan *portal web* Dishubkominfo, isinya sebagian besar merupakan berita yang dibuat oleh KIM. Tampilan tersebut terlihat sederhana dan didominasi berita dari KIM. Jumlah pengunjung web tersebut sampai dengan akhir Agustus 2016 berjumlah 6.039 kunjungan. Admin *portal web* KIM sebanyak tiga orang yaitu Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik Dishubkominfo, satu orang staf Bidang Komunikasi Informasi Publik Dishubkominfo dan satu orang koordinator KIM yaitu Bapak Abdul Satar yang menjadi ketua KIM Mekarsari Kecamatan Mekarsari. Semua naskah berita yang mengunggah adalah koordinator KIM ini setelah diedit oleh ketua KIM dan koordinator

KIM. Naskah yang masuk dipantau oleh Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik Dishubkominfo. Apabila ada naskah yang kurang memenuhi persyaratan maka naskah tersebut akan diedit ulang atau dihapus dari *portal web* KIM.

Tedapat batasan pada setiap naskah untuk bisa dimuat dalam portal KIM. Pengalaman di masa lalu saat dimana Jaring Kobar dihentikan kegiatan dan pembinaannya karena memberitakan dugaan penggunaan ijazah palsu calon Bupati yang akhirnya terpilih, membuat Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik Dishubkominfo membuat kebijakan yang sangat hati-hati agar berita yang dimuat KIM tidak mengundang kontroversi dan perdebatan. Pemberitaan yang sensitif benar-benar dihindari. Pemberitaan yang sensitif seperti dugaan korupsi atau dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah tidak pernah ditampilkan di portal KIM. Kalau memberitakan seseorang telah ditangkap aparat penegak hukum, menurut Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik Dishubkominfo masih boleh diberitakan meskipun dalam dokumentasi tidak pernah diberitakan.

Pemberitaan KIM yang paling banyak adalah kegiatan atau peristiwa-peristiwa di masyarakat yang mempunyai nilai positif dalam pembangunan. Peristiwa-peristiwa yang mempunyai nilai positif dalam pembangunan misalnya kebudayaan yang ada di daerah, potensi daerah, potensi ekonomi, potensi sumber daya alam, olah raga, kesehatan, pariwisata, cuaca dll. Pada umumnya informasi dan berita tersebut diharapkan dapat mendorong terjadinya pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Berita mengenai hal tersebut mendominasi *portal web* KIM.

Berita yang telah diunggah oleh KIM bervariasi jumlahnya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah arsip berita yang tercantum di belakang nama KIM. Sebagian besar anggota KIM di Lombok barat cukup aktif mengunggah berita dalam *portal web* Dishubkominfo. Keaktifan dalam penulisan tersebut tidak semata-mata karena adanya insentif honor tulisan tetapi karena kepuasan anggota pada setiap berita yang diunggah. Hal ini terlihat dari banyaknya berita yang diunggah meskipun honor yang diberikan pada setiap KIM di dibatasi maksimal untuk 5 berita per bulan. Bila banyak informasi yang menarik, berita yang diunggah bisa lebih dari 5

berita per bulan. Honor penulisan yang sering mereka sebut sebagai uang pulsa, hanya digunakan untuk keperluan membeli pulsa atau paket data dan uang rokok atau konsumsi saat mereka mengadakan pertemuan.

Kepuasan dalam penulisan berita dirasakan anggota KIM apabila berita tersebut direspon oleh pejabat pemerintah atau pembaca berita di portal KIM. Sangat banyak berita dari anggota KIM yang direspon pemerintah. Berita yang biasa direspon pemerintah umumnya tentang berita keluhan warga terhadap fasilitas umum yang rusak atau tidak berfungsi. Cepatnya respon terhadap keluhan warga yang disampaikan melalui *portal web* ini menunjukkan aparat pemerintah aktif mengikuti berita yang disampaikan di *portal web* KIM. Pemerintah daerah sendiri juga menganggap KIM sebagai mitra untuk menampung aspirasi masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat tentu sulit dipantau secara langsung oleh pemerintah. Seringkali berita yang dimuat di portal KIM menjadi acuan berita di media massa lainnya seperti koran dan radio. Adanya jembatan yang rusak di perbatasan Lombok Barat dan Kota Mataram yang tidak segera diperbaiki, pertama kali diunggah oleh anggota KIM. Rupanya penelantaran perbaikan jembatan tersebut karena antar pemerintah Lombok Barat dan Mataram saling lempar tanggungjawab untuk memperbaiki jembatan karena lokasinya berada di tengah perbatasan. Setelah sering diberitakan dan juga menjadi pemberitaan di berbagai koran akhirnya jembatan tersebut baru diperbaiki setelah antar pemerintah berkoordinasi.

Pengamatan narasumber terhadap masyarakat yang membaca berita yang dibuat anggota KIM di internet masih sedikit atau jarang. Mereka hanya sering melihat yang mengakses berita KIM di portal KIM kebanyakan sesama komunitas anggota KIM. Meskipun demikian hal tersebut tidak mengurangi semangat anggota KIM untuk menulis dalam portal KIM karena beritanya banyak diakses oleh pejabat di Lombok Barat.

Bagi tokoh masyarakat dan kepala desa, KIM dianggap sebagai media yang efektif untuk mensosialisasikan program pemerintah, terutama program desa. Kepala desa sering meminta tolong pada anggota KIM untuk mensosialisasikan program desa yang sedang dilaksanakan.

KESIMPULAN

1. Anggota KIM di Lombo Barat aktif menulis berita di *portal web* Dishubkominfo dan portal KIM. Keaktifan menulis berita ini bisa dilihat dari banyaknya berita yang ditulis meskipun honor yang diberikan dibatasi sebanyak maksimal 5 tulisan perbulan.
2. Berita yang dimuat dalam portal kominfo sering dibaca pejabat atau aparat pemerintah. Hal ini terlihat dari adanya respon dari pemerintah bila ada pemberitaan mengenai mengenai keluhan warga atas fasilitas umum yang rusak untuk segera diperbaiki.
3. Penggunaan *portal web* untuk menulis berita oleh anggota KIM cukup tinggi tetapi penguasaan TIK yang berkaitan dengan *portal web* sangat terbatas karena mereka tidak memiliki akses untuk mengunggah berita dalam *portal web* KIM.

SARAN

1. Pola pembinaan oleh pemerintah pada KIM dengan menyediakan *portal web* untuk memuat berita yang dibuat KIM sangat baik. Dengan sedikit saja bantuan berupa honor penulisan, anggota KIM dengan senang hati akan melaporkan peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Jurnalisme warga telah menjadi tren saat ini dan diperkirakan akan terus berkembang.
2. Setiap KIM perlu diberi akses pada portal web agar bisa meng *upload* berita dengan menjadikan salah satu anggotanya sebagai admin *portal web* KIM sehingga semakin banyak anggota yang berpartisipasi dalam membuat berita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala
Erdinaya. 2004. Komunikasi Massa
Suatu Pengantar. PT Remaja
Rosdakarya, Bandung.
- Engkos, Koswara, 2010, *Penelitian Pers dan
Komunikasi Pembangunan Volume 13
No. 3* Febuari 2010.
- Kemkominfo (2012). *ICT White Paper
Indonesia 2012*. Jakarta: Kementerian
Komunikasi dan Informatika.
- Katz, E. , Blumer, Jay G., Gurevitch, 1974.
Utilization of Mass Communication by

Individual, "The Uses of Mass
Communication: Curent Perspective on
Gratification Research", Beverly Hills-
London, Sage Publications.

Michael Gryseels et.al, 2015, Sepuluh Gagasan
Untuk Memaksimalkan Dampak Sosio-
Ekonomi TIK di Indonesia,
McKinsey&Company.

McLuhan, Marshall, 1999, *Understanding
Media; The Extension of Man*, London,
The MIT Press.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 17/PER/M/KOMINFO/03/2009
Tentang Diseminasi Informasi Nasional
Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi Dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 07/PER/M.KOMINFO/6/2010
Tentang Pedoman Pengembangan
Kemitraan Media.

Peraturan Menteri Kominfo RI No.
08/PER/M.KOMINFO/6/2010, tentang
Pedoman Pengembangan dan
Pemberdayaan Lembaga Komunikasi
Sosial.

<http://dishubkominfo.lombokbaratkab.go.id/>
<https://kimlombokbaratkab.wordpress.com/>.